

PERENCANAAN STRATEGIS PERSEDIAAN PERALATAN KEBENCANAAN BERDASARKAN SIKLUS KEBENCANAAN

Muhammad Dirhamsyah

Staf Laboratorium Desain dan Manufaktur, Fakultas Teknik
Jalan Syech Abdul Rauf No. 7, Tel. 0651-7552222 Email: mdirham@yahoo.com
Ketua Prodi Magister Ilmu Kebencanaan
Jalan Hamzah Fanshuri No. 3
Universitas Syiah Kuala, Darusalam, 23111

Abstrak

Paska bencana terbesar Kobe yang dikenal dengan Great Hanshin-Awaji Earthquake tahun 1995 dan kemudian disusul yang terjadi pada kawasan lautan hindia ditahun 2004. Banyak perhatian dunia mengarah kepada Jepang dan Indonesia. Di Indonesia, pengalaman ini telah menghasilkan konsep penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi yang terkandung dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta dilengkapi dengan peraturan pemerintah dan daerah. Peraturan kebencanaan terus menerus disempurnakan dengan baik, sedangkan pada penyediaan dan penyiapan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana masih memerlukan perencanaan strategis pemenuhan persediaan peralatan kebencanaan di situasi tertentu berdasarkan siklus kebencanaan. Persediaan ini sangat penting bagi perusahaan manufaktur dalam rangka kesesuaian pertumbuhan permintaan konsumen pada kawasan rawan bencana serta mengkonversikan bahan baku menjadi barang jadi dan kesiapan sumberdaya manusia. Walaupun pada kenyataannya di Indonesia masih belum lengkap ketersediaan basis data pelaku riset kebencanaan, buku biru riset kebencanaan, dan kordinasi para peneliti dengan acuan multidisiplin dan multisektoral. Pada makalah ini mengukus suatu rencana strategis persediaan peralatan kebencanaan berdasarkan siklus bencana.

Kata kunci: Penanggulangan bencana, persediaan peralatan kebencanaan dan siklus bencana

1. Pendahuluan

Penanggulangan bencana yang dilakukan pada pembangunan berkelanjutan perlu melakukan keseimbangan kesiapan rantai pasok, infrastruktur dan kemampuan sumberdaya manusia berdasarkan siklus bencana yaitu pada saat prabencana, saatbencana dan pascabencana. Investasi kemampuan dan ketersediaan infrastruktur, sumber daya, peralatan, kultur dan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana perlu dilakukan sejak dini pada saat prabencana.

Pada kejadian prabencana yang meliputi aspek kesiapsiagaan dan mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam mempersiapkan suatu perencanaan strategis ketersediaan dan kemampuan lokal dalam penanggulangan bencana berdasarkan pertimbangan pada saatbencana dan

pascabencana. Dengan kata lain, pada saat-bencana dan paska-bencana adalah suatu aplikasi terapan dari perencanaan strategis ketersediaan kemampuan struktural dan kemampuan kultur (non-struktural) dalamantisipasi bencana dengan kebijakan yang dilindungi oleh payung hukum yang berlaku.

Persediaan peralatan pada saat-bencana dan paska-bencana ditentukan oleh pengetahuan tentang risiko bencana berdasarkan data yang sistimatis dari peta risiko bencana berdasarkan jenis ancaman dan besarnya bencana yang terjadi, serta upaya memberdayakannya dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi korban luka, hilangnya jiwa, serta kerusakan harta benda dan lingkungan.

Paska bencana gempa Kobe tahun 1995 dan bencana tsunami tahun 2004 di kawasan lautan hindia menjadikan operasi lintas sektor

dalam manajemen tanggap darurat paska-bencana menjadi sangat menarik perhatian para peneliti dan praktisi [1].

Penyerapan dana penanggulangan bencana paska-bencana tsunami Aceh diperkirakan mencapai 4,45 milyar USD dan memberikan banyak pembelajaran bagaimana pemerintah dan masyarakat membangun kembali lebih baik tepat waktu dan target [2]. Dalam jangka waktu lima tahun berhasil membangun 140.304 rumah, 1.759 sekolah, 1.115 fasilitas kesehatan, 996 bangunan instansi pemerintah, 363 jembatan, 23 pelabuhan laut, 13 pelabuhan udara, dan jalan sepanjang 3.696 km. [3]

Pada makalah ini kita mencoba fokus pada perencanaan strategis untuk persediaan peralatan kebencanaan.

2. Siklus Bencana

Siklus bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 meliputi tahapan:

- a. Prabencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana
- b. Saat tanggap darurat, dimana dilakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya, penentuan status keadaan darurat bencana, dan penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- c. Pascabencana, dimana dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi

3. Perencanaan strategis persediaan peralatan kebencanaan

Mengacu pada undang-undang nomor 24 tahun 2007, beberapa kasus yang diamati untuk perencanaan strategis persediaan peralatan kebencanaan dengan beberapa kasus sebagai berikut:

3.1 Kasus Tanggap Darurat di muara kali Aceh

Pada tahun 2004 dilakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan perlu dilakukan terutama untuk mendapatkan informasi tentang serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan segera pada saat kejadian bencana..

3.2 Kasus Peralatan Penyelamatan dan evakuasi korban

- Mempelajari dan merintis jalur penyelamatan dan evakuasi.
- Mengupayakan pencarian dan penyelamatan
- Penyiapan pemenuhan kebutuhan dasar

3.3 Kasus Peralatan dan Sistem Pemenuhan kebutuhan dasar

Penyediaan dan penyiapan barang pasokan dan pengembangan sistem Rantai pasok [UU 24, 2007, pasal 53] meliputi penyediaan

- Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- Pangan
- Sandang
- Pelayanan kesehatan
- Pelayanan psikososial
- Penampungan dan tempat hunian

Pada pemahaman ketiga kasus ini menjadikan contoh bahwa para peneliti dan praktisi sudah seharusnya merubah cara pandang dengan memberikan perhatian dan pertimbangan bahwa siklus penyelenggaraan pada saat prabencana perlu diambil perhatian berdasarkan pengalaman dari kasus-kasus penyelenggaraan tanggap darurat dan pascabencana. Sehingga berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dan kesiapsiagaan mandiri harus terus berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Perencanaan strategis persediaan peralatan kebencanaan ini bukan saja milik dari kepakaran manufaktur tetapi juga perlu ada keterkaitan dengan kerentanan dan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana.

Daftar Pustaka

- [1] Alessandra Cozzolino, Humanitarian Logistics : Cross-Sector Cooperation in Disaster Relief Management, (2012) Springer Heidelberg New York Dordrecht London
- [2] Annon, Indonesia: Post-reconstruction Aceh – Leftover problems, Jakarta Post, 26 Dec 2009, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2014 dari <http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/26/postreconstruction-aceh-leftover-problems.html>.
- [3] Krishna S. Pribadi, Muhammad Dirhamsyah, Bayu Novianto, "Long-Term Post-Tsunami Recovery in Aceh: Survey of Community Perspective on Recovery Priorities" (2010), *Dalam proceedings of the 5th AIWEST-DR*, Banda Aceh, Indonesia, 23-25 November, ISSN: 2086-3195.
- [4] Muhammad Dirhamsyah, "Long-term Strategy on Aceh Tsunami and Mitigation" (2009), *Dalam proceedings of the 4th AIWEST-DR*, Banda Aceh, Indonesia, 23-25 November, ISSN:2086-3195
- [5] Undang-undang nomor 24 tahun 2007